

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan reproduksi adalah sebagai hasil akhir keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental dan sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem, fungsi serta proses reproduksi (ICPD 1994 dalam Marmi, 2015). Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 di Kairo menghasilkan kesepakatan bahwa fokus utama pelayanan kesehatan reproduksi ditujukan pada pelayanan yang mengutamakan kesehatan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi individu, baik bagi laki-laki maupun perempuan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari masa konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur, sampai dengan usia lanjut (Marmi, 2015). Dalam lingkup kesehatan reproduksi, kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan dan nifas menjadi masalah utama kesehatan reproduksi perempuan.

Saat ini, Indonesia masih mempunyai banyak permasalahan dan tantangan dalam upaya pelayanan kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi, yang tercermin dari masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu 22,23 per 1000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), serta masih rendahnya status kesehatan perempuan. Berdasarkan Riskesdas (2018), Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada perempuan usia 15-19 tahun sebesar 36,3% dan pada ibu hamil usia 15-19 tahun sebesar 33,5%. Sementara itu, anemia pada ibu hamil mengalami peningkatan pada Riskesdas (2013) sebesar 37,1% sedangkan tahun 2018 sebesar 48,9%. Pernikahan dan kehamilan remaja juga masih cukup tinggi. Menurut SDKI (2017), sebanyak 17,4% perempuan usia 19 tahun telah menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama. Sedangkan angka fertilitas kelompok umur 15-19 tahun sebesar 36/1000 perempuan umur 15-19 tahun.

Upaya untuk meningkatkan status kesehatan perempuan harus dilaksanakan bukan hanya setelah terjadi kehamilan, tetapi juga harus dilaksanakan lebih ke hulu lagi yaitu sejak masa remaja, dewasa muda/calon pengantin, dan wanita usia subur (Kemenkes RI, 2017). Salah satu intervensi yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menjalankan program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin (catin) yang ditugaskan khusus ke Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi. Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi berada di bawah naungan Direktorat Kesehatan Keluarga, yang memiliki program untuk usia reproduksi dari umur 15 sampai 49 tahun seperti kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin, perencanaan kehamilan bagi pasangan ODHA dsb. Konsep dasar Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin yaitu Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan catin tentang kesehatan reproduksi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin bertujuan untuk mempersiapkan kesehatan dan kesehatan reproduksi catin dalam perencanaan kehamilan.

Catin perlu mengetahui informasi kesehatan reproduksi untuk menjalankan proses, fungsi dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman. Catin perempuan akan menjadi calon ibu yang harus mempersiapkan kehamilannya agar dapat melahirkan anak yang sehat dan berkualitas. Catin laki-laki akan menjadi calon ayah yang harus memiliki kesehatan yang baik dan berpartisipasi dalam perencanaan keluarga, seperti menggunakan alat kontrasepsi serta mendukung kehamilan dan persalinan yang aman. Laki-laki dan perempuan mempunyai resiko masalah kesehatan reproduksi terhadap penularan penyakit. Perempuan lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi yang terjadi pada saat berhubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, keguguran, dan pemakaian alat kontrasepsi, karena struktur alat reproduksinya lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV (Kemenkes RI, 2017).

Agar setiap catin mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi maka diperlukan dukungan dan kerjasama penyuluh pernikahan di KUA dan lembaga

agama lainnya untuk memotivasi catin agar memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan petugas penyuluh pernikahan diperlukan bahan informasi yang dapat memberikan gambaran umum tentang kesehatan reproduksi yang diperlukan bagi catin dalam mempersiapkan dan merencanakan keluarga. Dengan adanya bahan informasi tersebut diharapkan penyuluh pernikahan dapat memotivasi catin memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan Kesehatan (Kemenkes RI, 2016).

Kementerian Kesehatan bersama Kementarian Agama telah menyusun buku saku bagi penyuluh pernikahan “Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, Menuju Keluarga Sehat”. Untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi diperlukan orientasi bagi penyuluh pernikahan. Orientasi adalah usaha membantu para pekerja agar mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dengan suatu situasi atau suatu lingkungan/iklim bisnis suatu organisasi/perusahaan (Nawawi, 2008). Orientasi berarti penyediaan informasi dasar berkenaan dengan program baru yang akan dijalankan oleh setiap provinsi dan kabupaten/kota, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan program secara memuaskan sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Keluarga melakukan orientasi secara berjenjang kepada pengelola program dari 34 provinsi yang dibagi dalam 2 angkatan, selanjutnya provinsi dengan dana dekonsentrasi melakukan orientasi kepada pengelola kabupaten kota.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pada penelitian ini penulis ingin mengetahui gambaran Orientasi KIE Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Orientasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Gambaran Umum Kementerian Kesehatan RI.
2. Mengetahui Gambaran Umum Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi Kementerian Kesehatan RI.
3. Mengetahui Gambaran *Input* (Sumber Daya Manusia, Anggaran, Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sarana dan Prasarana) dalam Orientasi KIE Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019.
4. Mengetahui Gambaran Proses (Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan) dalam Orientasi KIE Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019.
5. Mengetahui Gambaran *Output* (100% peserta yang diundang hadir) dalam Orientasi KIE Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Kementerian Kesehatan RI

1. Dapat mendayagunakan mahasiswa untuk membantu kegiatan operasional di Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi Kementerian Kesehatan RI.
2. Dapat menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul.
3. Suatu bentuk kerjasama dengan universitas untuk mengenalkan dunia kerja dan lapangan sebagai bekal keterampilan bagi mahasiswa.

1.3.2 Bagi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan UEU

1. Dapat dijadikan referensi kepustakaan.
2. Terjalin hubungan kerjasama antara Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul dengan Kementerian Kesehatan RI sehingga dapat mendukung proses pembelajaran.
3. Memperkenalkan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul kepada pihak luar.

1.3.3 Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Orientasi Bagi Petugas Pernikahan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Tingkat Pusat.
2. Sebagai sarana pelatihan serta pengalaman mengenai dunia kerja dan lapangan.